

IDENTIFIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERMASALAHAN KONSULTAN PENGAWAS DI SUMATERA BARAT

IDENTIFICATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND PROBLEMS OF SUPERVISORY CONSULTANTS IN WEST SUMATRA

Yusvina Helmi¹, Benny Hidayat², Taufika Ophiyandri³

^{1,2,3}Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas

Kampus Unand Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, 25165, Indonesia

Email: yusvinahelmi21@gmail.com

Received: 17 Februari 2025 Revised: 26 Maret 2025 Accepted: 12 April 2025 Published: 13 April 2025

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat, didukung oleh alokasi anggaran yang terus meningkat, mencapai Rp 422,7 triliun pada tahun 2024. Konsultan pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi dengan masyarakat, pelaporan yang tidak konsisten, dan dokumentasi yang tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian tugas konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara semi-terstruktur terhadap 10 konsultan pengawas di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tugas konsultan pengawas telah dilaksanakan dengan baik, dengan rata-rata pencapaian 83,64%-100%. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada beberapa tugas seperti koordinasi dengan masyarakat (50%), penggunaan identifikasi (20%), dan pelaporan bahan yang ditolak serta dokumentasi berita acara penyerahan (10%) yang memerlukan perbaikan. Masalah-masalah ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan menghambat keberhasilan proyek. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi sosial, digitalisasi pelaporan, dan standarisasi dokumentasi untuk mendukung keberhasilan proyek konstruksi.

Kata kunci: Kerangka Acuan Kerja, Konsultan Pengawas, Pelaporan Proyek, Proyek Konstruksi, Permasalahan Pengawasan

ABSTRACT

Infrastructure development in Indonesia continues to experience rapid growth, supported by an increasing budget allocation, reaching IDR 422.7 trillion by 2024. Supervision consultants have a strategic role in ensuring construction projects run according to predetermined specifications, time, and budget. However, practices in the field show various obstacles such as lack of community coordination, inconsistent reporting, and incomplete documentation. This study aims to evaluate the suitability of the supervisory consultant's duties with the Terms of Reference (TOR) and identify the problems encountered. A qualitative approach was used with semi-structured interviews with 10 supervision consultants in West Sumatra. The results showed that most of the supervisory consultants' tasks have been carried out well, with an average achievement of 83.64%-100%. However, problems exist in several tasks such as community coordination (50%), use of identification (20%), and reporting of rejected materials and documentation of submission minutes (10%) require improvement. These problems have the potential to reduce the effectiveness of supervision and hinder project success. This research recommends improving social coordination, digitizing reporting, and standardizing documentation to support the success of construction projects.

Keywords: Construction Project, Project Reporting, Supervision Challenges, Supervision Consultant, Terms of Reference

PENDAHULUAN

Indonesia terus membuat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Pada tahun 2024, anggaran infrastruktur nasional akan mencapai Rp 422,7 triliun, meningkat 5,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan investasi ini memberikan penekanan yang lebih besar pada kebutuhan untuk pengawasan proyek yang efektif untuk memastikan bahwa proyek konstruksi selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi teknis.

Terlepas dari perbaikan dalam pendanaan dan fokus kebijakan ini, keterlambatan dan inefisiensi dalam proyek-proyek konstruksi tetap terjadi secara luas. Sekitar 34% proyek di Indonesia mengalami perbedaan waktu dan biaya, yang seringkali disebabkan oleh pengawasan dan manajemen proyek yang tidak memadai (Khaidir, 2018). Meskipun gejala-gejala ini telah diketahui secara luas, namun hal ini berasal dari masalah yang lebih dalam yang jarang ditangani secara langsung.

Jika ditelusuri lebih jauh, akar masalahnya terletak pada beberapa kelemahan sistemik. Pertama, sering kali terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab para penasihat pengawas, yang mengakibatkan ambiguitas peran dan tumpang tindihnya kewenangan. Kedua, koordinasi di antara para pemangku kepentingan-termasuk lembaga pemerintah, kontraktor, dan masyarakat-sering kali tidak optimal, yang menyebabkan gangguan komunikasi dan keterlambatan pengambilan keputusan. Ketiga, kurangnya prosedur standar untuk pelaporan dan dokumentasi, yang menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemantauan.

Konsultan pengawas diberi mandat untuk memantau kualitas proyek, pemanfaatan sumber daya, pengendalian biaya, dan penegakan standar Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) (Kurniawan dkk., 2023).

Dalam penelitian sebelumnya menjelaskan pentingnya kesiapan konsultan pengawas dalam metode kerja, pengendalian mutu, dimensi, biaya, serta waktu dalam sebuah proyek (Damayanti dkk., 2025). Mereka juga bertindak sebagai perantara antara pemilik proyek dan kontraktor untuk memastikan komunikasi yang efektif selama proses konstruksi. Namun, di lapangan, mereka sering menghadapi kendala praktis seperti sumber daya manusia yang terbatas, pelatihan yang tidak memadai, kekakuan birokrasi, dan kurangnya alat digital untuk merampingkan pelaporan dan pemantauan.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural antara harapan dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan kapasitas dan kondisi aktual di lapangan. Mengatasi masalah-masalah di permukaan saja tidak akan cukup jika masalah-masalah mendasar - organisasi, prosedur, dan sistemik - tidak diidentifikasi dan diatasi secara menyeluruh. Hanya dengan mengatasi akar permasalahan ini, proses pengawasan dapat diperkuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia (Rita dkk., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan strategis dan terintegrasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu penguatan koordinasi sosial, digitalisasi proses pelaporan, dan standarisasi dokumentasi pengawasan. Penguatan koordinasi sosial dapat dilakukan melalui pelatihan komunikasi lintas pemangku kepentingan, pembentukan forum koordinasi rutin, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan. Digitalisasi pelaporan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akurasi informasi yang disampaikan oleh konsultan pengawas kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu, standarisasi

dokumentasi akan menjamin keseragaman dan kelengkapan data pengawasan di seluruh proyek. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan solusi-solusi tersebut secara simultan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan proyek, meminimalisir potensi penyimpangan waktu dan biaya, serta menjembatani kesenjangan antara peran ideal konsultan pengawas dengan kenyataan di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh konsultan pengawas dalam proyek konstruksi. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa lemahnya koordinasi antara tim pengawas dan pelaksana proyek menjadi penyebab utama keterlambatan proyek (Kurniawan dkk., 2023). Menyoroti bahwa penyimpangan kontrak sering terjadi karena laporan pengawasan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sementara itu, penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa laporan pengawasan seringkali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan kontrak (Kurniawan dkk., 2023). Penelitian sebelumnya di Sumatera Barat menunjukkan bahwa hambatan dalam pembebasan lahan dan kurangnya ketelitian dalam survei lapangan menyebabkan perubahan desain yang berujung pada keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya (Lidya dkk., 2024). Studi lain menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pada tahap awal proyek untuk mencegah konflik sosial yang menghambat implementasi (Rani, 2016). Kendala dalam memantau kualitas pekerjaan karena tidak adanya standar dokumentasi yang seragam (Putra dkk., 2021). Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran konsultan pengawas sering kali menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan dan lambat nya pengambilan keputusan (Haswarta dan Wijaya, 2023). Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam

mengidentifikasi permasalahan umum pengawasan proyek konstruksi, namun sebagian besar belum secara spesifik mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), khususnya dalam konteks proyek infrastruktur di Sumatera Barat. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijembatani untuk memahami sejauh mana kesesuaian pelaksanaan tugas konsultan pengawas dengan peran formalnya, dan bagaimana kesenjangan tersebut mempengaruhi efektivitas proyek secara keseluruhan.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar terkait pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada identifikasi secara umum mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek atau kendala komunikasi dalam pelaksanaan konstruksi, namun belum secara spesifik meneliti apakah peran konsultan pengawas telah dijalankan sesuai dengan mandat yang tertera di dalam KAK, khususnya dalam konteks proyek infrastruktur di Sumatera Barat. Kesenjangan ini penting untuk diteliti karena kesesuaian peran dengan KAK merupakan indikator kunci dalam menilai efektivitas pengawasan proyek.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan tanggung jawab konsultan pengawas dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam proyek-proyek konstruksi di Sumatera Barat. Dengan memahami permasalahan yang dihadapi dalam lebih mendalam diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengoptimalkan kontribusi konsultan

Identifikasi Tugas dan (Helmi/hal. 174-183)

pengawas dalam mendukung keberhasilan proyek konstruksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada proyek-proyek konstruksi di Sumatera Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan 10 orang konsultan pengawas dari berbagai asosiasi INKINDO, PERKINDO, dan PERKONINDO yang terkait di Sumatera Barat. Responden dipilih dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, dengan kriteria pengalaman minimal lima tahun dalam proyek konstruksi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman berbasis Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan direkam untuk memastikan keakuratannya. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen proyek, laporan resmi, dan publikasi akademis yang terkait dengan standar pengawasan konstruksi.

Metode wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan kepada responden untuk mengungkapkan pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan proyek (Waruwu, 2023). Studi dokumen digunakan untuk membandingkan praktik di lapangan dengan standar untuk mengidentifikasi kesenjangan.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, yang melibatkan identifikasi pola yang berulang, tema dominan, dan wawasan utama dari wawancara dan tinjauan dokumen. Proses ini mencakup pengkodean terbuka, kategorisasi, dan interpretasi tema-tema yang mencerminkan pengalaman yang sama dan berbeda di antara para peserta. Teknik triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara

dan studi dokumen untuk meningkatkan validitas data.

Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini akan kuat secara ilmiah dan memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi aktual praktik pengawasan dalam proyek konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan isi KAK, perbaikan sistem pengawasan, dan optimalisasi peran konsultan pengawas dalam meningkatkan keberhasilan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) konstruksi proyek di Sumatera Barat. Konsultan pengawas memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan pemilik proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memastikan bahwa kegiatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal. Oleh karena itu, menilai seberapa dekat kesesuaian tugas mereka dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan memberikan gambaran tentang kualitas dan integritas pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan 10 konsultan pengawas yang tergabung asosiasi konsultan, ditemukan bahwa sebagian besar tugas telah dilaksanakan dengan baik dan secara umum sejalan dengan KAK. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan, terutama di area yang melibatkan koordinasi dengan pihak eksternal dan aspek administratif pengawasan. Pengawasan teknis, termasuk pemeriksaan kualitas dan manajemen waktu, ditemukan selaras dengan KAK, yang menunjukkan bahwa para konsultan mahir dalam mengelola fungsi-fungsi teknis inti.

Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam pengendalian biaya dan pengawasan dokumentasi - area yang sama pentingnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proyek. Secara khusus, dokumentasi yang tidak efektif atas material yang ditolak, kondisi cuaca, dan jam kerja berpotensi menyebabkan perbedaan data, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keakuratan pengambilan keputusan di tingkat manajemen proyek.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan tugas konsultan pengawas bervariasi sesuai dengan fase proyek. Pada tahap persiapan, rata-rata pelaksanaan mencapai 83,64%, yang mencerminkan kinerja yang baik dalam perencanaan teknis. Namun, koordinasi dengan masyarakat dan proses perizinan berulang kali disebutkan sebagai hambatan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perencanaan teknis secara umum diprioritaskan, namun keterlibatan sosial dan kesiapan administratif sering diabaikan, yang dapat memicu komplikasi di masa depan selama tahap pelaksanaan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun persiapan teknis sudah baik, namun aspek administratif dan sosial kurang mendapat perhatian. Penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa kurangnya koordinasi awal sering menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proyek (Rita dkk., 2022).

Pada tahap pengawasan, rata-rata implementasi mencapai 95,71%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Konsultan pengawas efektif dalam mengawasi integritas struktural, pelacakan kemajuan, dan jaminan kualitas. Namun, pemeriksaan ukuran material dan pengawasan biaya secara konsisten disebutkan sebagai area yang perlu ditingkatkan. Responden menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan teknis yang tidak memadai, dan penugasan yang tumpang tindih sebagai

faktor utama yang mempengaruhi kinerja di bidang-bidang ini. Keterbatasan ini selaras dengan temuan sebelumnya yang menekankan dampak ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja terhadap efektivitas pengawasan secara keseluruhan dalam proyek konstruksi (Tuelah dkk., 2014).

Pada tahap konsultasi, implementasi mencapai 100%, yang mencerminkan komunikasi dan kolaborasi yang optimal antara konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor. Hal ini mendukung temuan, yang menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan konsisten antara para pihak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan meningkatkan pengambilan keputusan (Setiobudi, 2018). Meskipun demikian, meskipun koordinasi internal tampak efektif, koordinasi eksternal, terutama dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal, masih lemah. Hal ini menimbulkan ketegangan selama implementasi, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki sengketa penggunaan lahan atau masalah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen KAK di masa depan mungkin perlu secara eksplisit memasukkan tanggung jawab penghubung sosial sebagai bagian dari tugas konsultan pengawas.

Pada tahap pelaporan, rata-rata implementasi mencapai 86,47%. Meskipun laporan kemajuan standar disampaikan secara teratur, masih ada masalah dalam mendokumentasikan kondisi spesifik lokasi, seperti perubahan cuaca, material yang ditolak, dan kehadiran tenaga kerja. Kekurangan ini disebabkan oleh praktik pelaporan manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Beberapa responden menyatakan perlunya alat atau aplikasi digital yang memungkinkan pengambilan dan pengiriman data secara *real-time*. Sistem pelaporan yang lemah sering kali menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan proyek, yang berdampak pada penundaan dan peningkatan biaya (Firdaus dkk., 2020).

Identifikasi Tugas dan (Helmi/hal. 174-183)

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa koordinasi yang buruk antara konsultan pengawas dan kontraktor merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek (Ophiyandri dkk., 2023). Studi ini menegaskan kembali bahwa koordinasi eksternal-tidak hanya dalam hubungan kontraktor-konsultan tetapi juga dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan utilitas-sering kali kurang diperhatikan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa beberapa konsultan pengawas harus melanjutkan peran pengawasan mereka bahkan setelah masa kontrak berakhir karena penundaan dan modifikasi desain yang tidak terselesaikan.

Penelitian ini juga mendukung temuan yang menyatakan bahwa konsultan pengawas sering kali harus terus bekerja bahkan setelah kontrak berakhir karena keterlambatan proyek (Vitri dan Herman, 2018). Dalam wawancara, beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka masih terlibat dalam proyek yang seharusnya sudah selesai, karena keterlambatan pada tahap perencanaan dan perubahan desain.

Selain itu, disoroti hubungan antara reputasi konsultan pengawas dan transparansi laporan proyek (Siahaan dan Simanjuntak, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, studi saat ini mengungkapkan bahwa praktik pelaporan masih menjadi area

yang membutuhkan perbaikan substansial, terutama dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi informasi yang didokumentasikan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan kualitas yang lebih kuat, mungkin dalam bentuk audit independen atau sistem validasi laporan otomatis, mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan dalam pelaporan pengawasan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi teknis utama konsultan pengawas umumnya dijalankan dengan baik, komponen pendukung seperti koordinasi, dokumentasi, dan pengendalian biaya memerlukan penguatan yang signifikan. Hal ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan praktik lapangan yang sebenarnya, terutama di bidang-bidang yang melibatkan interaksi lintas sektoral dan kerumitan administratif. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu dilakukan revisi KAK dengan memasukkan pedoman yang lebih jelas untuk koordinasi sosial, memperkenalkan platform digital untuk pelaporan waktu nyata, dan berinvestasi dalam peningkatan kapasitas untuk memastikan bahwa personel pengawas diperlengkapi untuk mengelola tantangan teknis dan non-teknis.

Tabel 1 menyajikan ringkasan persentase pelaksanaan tugas oleh konsultan pengawas di enam tahap utama pengawasan proyek konstruksi.

Tabel 1. Data Persentase Konsultan Pengawas dalam Melaksanakan Tugas

Tahapan	Presentase (%)	Kategori
Pekerjaan persiapan	83.64	Bagus
Pengawasan	95.71	Sangat Bagus
Konsultasi	100	Sangat Bagus
Laporan	86.47	Bagus
Mengoptimalkan Pekerjaan	97.5	Sangat Bagus
Dokumen	77.5	Bagus

Data tersebut mencerminkan tingkat keselarasan antara pelaksanaan tugas dan standar yang diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pada tahap pekerjaan persiapan, rata-rata pelaksanaan mencapai 83,64%, yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsultan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan pengawasan proyek dalam hal dokumentasi dan koordinasi awal, meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan di beberapa bidang seperti perizinan dan pelibatan masyarakat.

Pada tahap pengawasan, yang melibatkan pemantauan harian dan kontrol kualitas, tingkat pelaksanaannya adalah 95,71%, diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa konsultan secara umum efektif dalam pengawasan teknis, termasuk manajemen waktu dan kualitas.

Tahap konsultasi mencatat kinerja tertinggi yaitu 100%, yang menunjukkan implementasi "Sangat Baik". Hal ini mencerminkan keberhasilan koordinasi dan komunikasi antara konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Tahap pelaporan mendapat nilai 86,47%, dikategorikan sebagai "Baik". Meskipun laporan secara umum disampaikan secara teratur, namun masih diperlukan perbaikan dalam mendokumentasikan variabel-variabel tertentu seperti kondisi cuaca, penolakan material, dan jam kerja harian.

Untuk mengoptimalkan pekerjaan, yang mencakup pemecahan masalah secara proaktif dan memastikan peningkatan proyek yang berkelanjutan, tingkat implementasi adalah 97,5%, sekali lagi ditandai sebagai "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari para

konsultan untuk mencapai tujuan proyek di luar tugas standar mereka.

Terakhir, tahap dokumentasi memiliki nilai terendah yaitu 77,5%, masuk dalam kategori "Baik". Meskipun dikategorikan memadai, area ini menyoroati perlunya peningkatan, terutama dalam menstandarisasi praktik dokumentasi dan memastikan kelengkapan dan keakuratan dalam mencatat detail proyek.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar tahapan pengawasan dilaksanakan pada tingkat yang baik hingga sangat baik, beberapa aspek - terutama dokumentasi - masih memerlukan perbaikan yang ditargetkan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap standar KAK dan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas proyek.

Selain mengevaluasi tingkat pelaksanaan tugas, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konsultan pengawas dalam menjalankan kewajibannya. Permasalahan-permasalahan tersebut mempengaruhi efektivitas pengawasan proyek konstruksi di Sumatera Barat:

1. Koordinasi dengan Masyarakat (50%)

Setengah dari responden menyatakan bahwa koordinasi dengan masyarakat bukanlah prioritas utama mereka, karena mereka menganggap tugas ini merupakan tanggung jawab kontraktor atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, banyak proyek yang menghadapi penolakan dari masyarakat setempat, yang sering kali berujung pada penundaan pekerjaan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penundaan akibat konflik sosial dapat meningkatkan biaya proyek karena diperlukannya negosiasi ulang atau perubahan rencana kerja (Azis dkk., 2016). Dalam kondisi seperti ini, konsultan pengawas harus berpartisipasi dalam menjembatani komunikasi antara pemilik

Identifikasi Tugas dan (Helmi/hal. 174-183)

proyek dan masyarakat untuk mengurangi potensi gangguan.

2. Kurangnya Identifikasi (20%)

Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa identifikasi pekerja di lapangan masih kurang optimal, karena banyak pekerja yang tidak menggunakan tanda pengenalan resmi. Hal ini meningkatkan risiko keamanan, terutama pada proyek-proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai subkontraktor. Studi sebelumnya menyoroti bahwa dalam proyek berskala besar, sistem identifikasi tenaga kerja yang buruk dapat menyulitkan pengawasan dan menghambat koordinasi tim (Maulana dan Harisman, 2024). Penggunaan identifikasi yang jelas dan terstandarisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan manajemen tenaga kerja.

3. Pelaporan yang Tidak Konsisten (60%-70%)

Mayoritas konsultan pengawas mengakui bahwa laporan harian dan mingguan seringkali tidak akurat, terutama dalam aspek pelaporan material yang ditolak, jam kerja, dan kondisi cuaca. Laporan yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahan dalam mengevaluasi kemajuan proyek, yang berakibat pada keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dan penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu (Sumajouw dan Tarot, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan standarisasi dalam sistem pelaporan, termasuk mekanisme audit data lapangan yang lebih ketat.

4. Dokumentasi Tidak Lengkap (10%)

Meskipun dokumentasi proyek merupakan bagian penting dari administrasi proyek, 10% responden menyatakan bahwa pembuatan berita acara serah terima sering diabaikan. Kelemahan dalam dokumentasi ini dapat menghambat proses administrasi, seperti klaim pembayaran dan serah terima pekerjaan. Kurangnya dokumentasi proyek dapat menurunkan tingkat kepercayaan pemilik proyek terhadap kinerja konsultan

pengawas, yang berdampak pada peluang mereka untuk mendapatkan proyek baru (Hanun dkk., 2019). Oleh karena itu, kebijakan internal yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan semua dokumen proyek diselesaikan tepat waktu.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas pada proyek-proyek konstruksi di Sumatera Barat berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tugas telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala utama, seperti kurangnya koordinasi dengan masyarakat, ketidakkonsistenan dalam pelaporan, kelemahan dalam pengendalian biaya dan kualitas, dan dokumentasi yang tidak lengkap. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti peran penting konsultan pengawas dalam memastikan kualitas proyek serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, seperti kompetensi personel, kepatuhan terhadap standar, dan koordinasi antarpihak.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan memperdalam pemahaman tentang tantangan praktis yang dihadapi oleh konsultan pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti memperkuat sistem koordinasi eksternal, meningkatkan standar pelaporan, dan melatih personil pengawasan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah responden dan cakupan wilayah, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif yang lebih luas atau membandingkan pelaksanaan pengawasan di berbagai daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, S., Putranto, E. H. D., dan Yuniyanto, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kinerja Konsultan Pengawas yang Berpengaruh terhadap Waktu dan Mutu Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Info Manpro*, 7(2), 38–49.
- Damayanti, T., Yuni, N. K. S. E., Yuliana, N. P. I., dan Wahyudi, I. G. B. (2025). Identifikasi Kesenjangan Kinerja Konsultan Pengawas Konstruksi di Kota Denpasar. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 20(1), 84–92.
- Firdaus, Hidayat, B., dan Istijono, B. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Sumberdaya Air di Kabupaten Solok. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 16(2), 132–141.
- Hanun, Y., Simanjuntak, M. R. A., dan Priyambodo, A. B. (2019). Jalan Tol pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Cisumdawu). *Seminar Nasional Technopex Institut Teknologi Indonesia*, 103–108.
- Haswartalmi, A. dan Wijaya K. (2023). Analisis Kinerja Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas terhadap Proyek Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Insinyur Profesional*, 2(2), 38–47.
- Khaidir, I. (2018). Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Sumatera Barat. *Jurnal Rekayasa*, 8(1), 32–49.
- Kurniawan, A. Destinia, Aulia, M. H., Ananda, Z. K., Zulfikli, Syaputra, D. (2023). Peran Pengawas Proyek dalam Memastikan Kesuksesan Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 56–61.
- Lidya, V. N., Ophiyandri, T., dan Hidayat, B. (2024). Identifikasi Faktor Penting dalam Manajemen Material Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinaru Research and Development*, 6(6), 2300–2309.
- Maulana, I., dan Harisman. (2024). Perbuatan Kelalaian oleh Konsultan Pengawas Konstruksi Atas Bangunan yang Menyebabkan Kerugian Negara. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(5), 2010–2026.
- Ophiyandri, T., Hadiguna, R. A., dan Honesti, D. (2023). Penyebab Keterlambatan Konstruksi Proyek Jalan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Bangunan: Konstruksi & Desain*, 1(2), 109–114.
- Putra, I. K. A. A., Pagehgiri, J., dan Ariyanta, I. P. G. (2021). Analisis Kinerja Konsultan Pengawas Konstruksi dalam Pelaksanaan Proyek Gedung Puskesmas di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Teknik Gradien*, 13(1), 48–60.
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rita, E., Carlo, N., dan Nandi. (2021). Penyebab dan Dampak Keterlambatan Pekerjaan Jalan di Sumatera Barat Indonesia. *Jurnal Rekayasa*, 11(1), 27–37.
- Setiobudi, A. (2018). Analisis Kinerja Konsultan Pengawas pada Proyek Jalan Tol Ruas Palembang - Simpang Indralaya (Palindra). *Jurnal Deformasi*, 3(1), 82–95.
- Siahaan, S. B. dan Simanjuntak, M. R. A. (2022). Kajian Identifikasi Risiko pada Tahap Pelaksanaan Proyek Konstruksi: Studi Kasus Multiple Project Management. *Jurnal Ilmiah*

Identifikasi Tugas dan (Helmi/hal. 174-183)

- Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 578–585.
- Sumajouw, M. D. J., dan Tarore, H. (2013). Analisis Kinerja Konsultan Pengawas pada Proyek Jalan dan Jembatan di Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 3(2), 79–83.
- Tuelah, J. D. P., Tjakra, J., dan Walangitan, D. R. O. (2014). Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi pada Tahap Pelaksanaan Proyek Pembangunan. *Tekno Sipil*, 12(61), 47–54.
- Vitri, G. dan Herman, H. (2018). Peranan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Pemberdayaan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 5(2), 96–105.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.